

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2021



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TEBO
2020**

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti alur manajemen kepegawaian daerah yang professional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah pelayanan di bidang kepegawaian kepada aparatur sipil.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021 mendatang.

Muara Tebo, 2020
Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



Harvadi, S.Sol. M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680709199021001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKPSDM.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM.....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III. TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021	39
BAB V. PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo

(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Perkiraan Maju Tahun 2022

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2019 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019.

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2019 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp.7.956.227.673,-. Terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 2.509.058.113,- dan Biaya Langsung sebesar Rp. 5.447.169.560,-.

Seluruh Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2019 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Tahun 2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan kegiatan renja tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	2400 lembar materai 6000 dan 1.200 lembar materai 3000	800 lembar materai 6000 dan 400 materai 3000	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	100%	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	1600 lembar materai 6000 dan 800 materai 3000	66,67%
4.01.4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	24 unit	8	4	4	100%	4	16	66,67%

4.01.4.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	24 paket	8	4	4	100%	4	16	66,67%
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	12 paket	4	2	2	100%	2	8	66,67%
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor	24 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	16 paket	66,67%
4.01.4.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah periode Terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah periode Pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	72 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%

4.01.4.05.01.01.20	Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	jumlah periode pembayaran tenaga honorer untuk petugas kebersihan kantor, Sopir, Penjaga Malam dan administrasi (6 org)	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%							
4.01.4.05.01.02.	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya perencanaan rehab gedung kantor, tersedia conblok halaman gedung kantor dan tempat parkir	6 paket		3 paket	3 paket	100%	1 paket	4 paket	66,67%
4.01.4.05.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0	2 paket	50%
4.01.4.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang rutin dipelihara	roda 2 96 unit roda 4 24 unit	roda2 32 unit roda 4 8 unit	roda2 16 unit roda 4 4 unit	roda2 16 unit roda 4 4 unit	100%	roda2 16 unit roda 4 4 unit	roda2 64 unit roda 4 16 unit	66,67%
		Jumlah periode Pembelian BBM	72	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah periode Terpeliharanya peralatan kerja kantor	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%							

4.01.4.05.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas	246 stel	70 stell	35 stel	35 stel	100%	40	145 stell	58,94%
4.01.4.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian batik dan olah raga	504	140	70	70	100%	80	290	57,53%
4.01.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%							
4.01.4.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	75	15	15	15	100%	15	60	80%
4.01.4.05.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta Diklat	1853	162	250	165	66%	250	250	30%
4.01.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100%							
4.01.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36	12	6	6	100%			50%
2.12.4.05.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	6							
2.12.4.05.01.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	6	2	1	1	100%	1	4	67%

4.01.4.05.01.15	Program Pendidikan kedinasan	Persentase peningkatan kualitas ASN								
4.01.4.05.01.15.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah peserta diklat kepemimpinan	78	18	15	15	100%	15	48	61,53%
4.01.4.05.01.30	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	61	21	10	3	30%	10	38	62,29%
4.01.4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah penerimaan CPNS sesuai formasi.	1399	314	250	195	78%	250	759	54,25%
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi	1149	159	250	165	66%	250	574	49,95%
4.01.4.05.01.30.06	Penyusunan Formasi dan Penataan PNS	Jumlah dokumen formasi yang disusun	6	2	1	1	100%	1	4	67%
4.01.4.05.01.30.04	Penataan sistem kenaikan pangkat.	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	4655	1368	850	729	86%	800	2997	68,38%
4.01.4.05.01.30.08	Pengelolaan administrasi taspem, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	Jumlah Dokumen Taspem, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	21,316	6438	3,547	3405	96%	3,634	13477	63,22%

4.01.4.05.01.30.16	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diproses	2063	423	325	343	106%	350	1116	54,09%
4.01.4.05.01.30.05	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	Persentase validasi kepegawaian	85%	75	80	80	100%	80%	80%	94,11%
4.01.4.05.01.30.14	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	Persentase terpeliharanya jaringan SAPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.4.05.01.30.26	Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD	Persentase terpeliharanya jaringan SAIPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	55	10	9	9	100%	9	26	47,27%
4.01.4.05.01.30.17	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	Jumlah rekomendasi izin cerai	72	18	11	5	45%	12	35	48,61%
4.01.4.05.01.30.25	Pelantikan sumpah dan janji PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah dan janji PNS	1160	159	250	9	4%	250	418	36,03%
4.01.4.05.01.30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar	34	10	7	4	57%	7	21	61,76%
4.01.4.05.01.30.07	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	Jumlah dokumen penilaian kinerja	8,315	2683	1,400	1368	98%	1,400	5,451	65,55%
4.01.4.05.01.30.15	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah peserta rapat kepegawaian	450	150	75	75	100%	75	300	67%

4.05.4.05.01.16	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri								
4.05.4.05.01.16.01	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	Jumlah pekan olah raga korpri tingkat propinsi	2					1	1	
4.05.4.05.01.16.03	Pekan olahraga korpri antar SKPD	Jumlah pekan olahraga korpri antar skpd	2	1	0	0	0		1	50%
4.05.4.05.01.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri								
4.05.4.05.01.17.01	Sosialisasi Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) KORPRI	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Konsultasi Bantuan Hukum	3	1	0	0	0	0	1	33,33%

Dari tabel diatas terdapat kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah
Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah terealisasi sebesar 66% dimana target semula 250 orang sedangkan terealisasi 165 orang. Hal tersebut dikarenakan karena hanya terdapat 165 formasi penerimaan CPNS di tahun 2018 sehingga 165 oranglah yang mengikuti diklat prajabatan.
2. Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir
Kegiatan rencana penyusunan karir target semula adalah sepuluh peserta dan ternyata jabatan tinggi pratama yang kosong sebanyak tujuh jabatan, sehingga dibuka penerimaan ujian kompetensi untuk mengisi jabatan tinggi pratama sebanyak tujuh formasi, namun ternyata hanya terdapat tiga jabatan yang memiliki pendaftar yang sesuai kriteria persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga hanya terdapat 3 JPT yang dilakukan uji kompetensi dan terisi. Oleh karena itu persentase realisasi hanya 30%
3. Kegiatan penempatan PNS
Kegiatan penempatan PNS terealisasi sebesar 66% dikarenakan karena jumlah formasi penerimaan CPNS di tahun 2018 sebanyak 165 sehingga penempatan CPNS sebesar 165 orang.
4. Kegiatan penanganan kasus perceraian
Kegiatan penanganan kasus perceraian terealisasi sebesar 45%. Hal tersebut dikarenakan target yang terlalu besar sedangkan kasus perceraian yang masuk hanya 7 kasus dan terealisasi 5 kasus, sehingga persentase menjadi kecil.
5. Pelantikan dan sumpah janji PNS
Kegiatan pelantikan dan sumpah janji PNS terealisasi sebesar 4% disebabkan karena target yang terlalu besar disesuaikan dengan target penerimaan CPNS setiap tahunnya, sedangkan CPNS tahun 2018 belum diangkat menjadi PNS, sehingga belum bisa dilakukan sumpah dan janji PNS. Kegiatan pelantikan dan sumpah janji PNS

tersebut terealisasi untuk PNS yang belum melakukan sumpah dan janji PNS sebanyak 9 orang.

Dari kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tersebut pada umumnya merupakan kelebihan dalam menentukan target, dimana urusan kepegawaian sulit untuk menentukan target secara pasti, misalnya jumlah formasi untuk penerimaan calon aparatur sipil Negara ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara, sehingga pada awal perencanaan tidak diketahui secara pasti dan begitu juga dengan kegiatan lainnya. Untuk selanjutnya perlu berhati-hati dan perhitungan dalam menentukan indikator kinerja kegiatan dan program.

Selain kegiatan diatas pada umumnya kegiatan lain telah mencapai target kinerja dan terdapat beberapa kegiatan yang melebihi target kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini BKPSDM Kabupaten Tebo belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo belum maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan dengan berbagai kendala dan masalah mendasar yaitu :

- a. Jumlah aparatur yang terbatas
- b. Sarana dan prasarana yang masih minim
- c. Sumber Daya Aparatur yang masih lemah/ belum professional
- d. Anggaran yang terbatas

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan system dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Bazzeting pegawai
- b. Administrasi kenaikan pangkat
- c. Administrasi kenaikan gaji berkala pegawai
- d. Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai
- e. Pengurusan ijin belajar
- f. Pengurusan tugas belajar
- g. Prosedur pengajuan kartu pegawai
- h. Penerbitan kartu suami istri
- i. Administrasi pengajuan cuti
- j. Pemberian penghargaan/reward dan sanksi

- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l. Ujian dinas
- m. Kesejahteraan pegawai

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo

NO	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2018	2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penempatan aparatur sesuai Bazeeting			65 %	65%	75%	75%	115,2%	110,83%	75%	75%	
2	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur			40%	50%	60%	70%	105,37%	82,72%	60%	70%	
3	Persentase penanganan kasus disiplin ASN			50%	60%	60%	60%	100%	166,66%	60%	60%	
4	Persentase akurasi data kepegawaian			75%	80%	80%	80%	100%	120,31%	80%	80%	
5	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian			80%	81%	82%	83%	107,5%	105,61%	82%	83%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Tebo 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan Sumber daya Manusia yang berkualitas profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah selaku pelayan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan pelayanan prima di daerah. Dari analisis isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan yang menjadi **kekuatan** yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Analisis yang menjadi **kelemahan** daerah adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang menjadikan **peluang** daerah adalah adanya political will secara nasional untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi **ancaman** daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai perkembangan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi : perencanaan (formasi), persyaratan

pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan (reward), pensiun. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa **leadership dikalangan pemerintahan** dan semangat entrepreneur dikalangan masyarakat luas, yang selanjutnya diarahkan ke dalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo. Sebagai konsekwensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil Identifikasi Permasalahan tugas pokok fungsi dilakukan melalui analisa SWOT.

Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi perhatian untuk kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah.

Secara umum permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.

2. Kurang sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.
3. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated, dan berbasis pada kinerja;
4. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
5. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
6. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan secara optimal;
7. Sistem penilaian kinerja belum obyektif;
8. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh pegawai;
9. Belum sesuai antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi aparatur yang tersedia;
10. Penyebaran SDM aparatur belum merata;
11. Masih lemahnya tingkat budaya kerja aparatur, sehingga berpengaruh pada kinerja aparatur khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (Opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :

1. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Tersedianya dana APBD Kabupaten Tebo yang memadai,
3. Adanya komitmen pimpinan.
4. Tersedianya jaringan SAPK.
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Tantangan (threats) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kulaitas prima dan kinerja organisasi publik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
4. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparatur yang bebas dari KKN.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
6. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai.

b. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal – hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Adapun kelemahan – kelemahan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada customer (pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo)

2. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian.
3. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
6. Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian.

Sedangkan kekuatan – kekuatan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya.
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya skala prioritas program kerja.
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan – kegiatan di bidang kepegawaian.
5. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan.
6. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.
7. Profesionalisme pegawai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana kerja (Renja) BKPSDM tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang seharusnya telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) BKPSDM. Renja Tahun 2021 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKPSDM Kabupaten Tebo.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2021;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKPSDM Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2021 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2021. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah dimana terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
BKPSDM Kabupaten Tebo

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	3,114,855,761.80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	2,614,855,690.38	
Administrasi Keuangan	BKPSDM	Persentase penyerapan administrasi keuangan	100%	3,114,855,761.80	Administrasi Keuangan	BKPSDM	Persentase penyerapan administrasi keuangan	100%	2,614,855,690.38	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	27 orang	3,114,855,761.80	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	27 orang	2,614,855,690.38	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	1,517,901,600.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	1,090,400,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum	BKPSDM	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%	1,391,501,600	Kegiatan Administrasi Umum	BKPSDM	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%	964,000,000	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000	1. Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000	
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		jumlah periode pembayaran jasa Listrik	12 bulan	75,000,000	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		jumlah periode pembayaran jasa Listrik	12 bulan	75,000,000	

3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap	12 bulan	1,200,000	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap	12 bulan	1,200,000	
4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	BKPSDM	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	27,000,000	4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	BKPSDM	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	27,000,000	
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	20 unit	7,780,000	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	20 unit	7,780,000	
6. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	12 bulan	116,800,000	6. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	12 bulan	116,800,000	
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPSDM	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	4 paket	39,000,000	7. Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPSDM	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	4 paket	39,000,000	
8. Penyediaan alat tulis kantor	BKPSDM	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	2 paket	70,000,000	8. Penyediaan alat tulis kantor	BKPSDM	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	2 paket	70,000,000	
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	jumlah Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	50,000,000	9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	jumlah Tersedianya barang cetak, dan penggandaan	12 bulan	50,000,000	
10. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BKPSDM	jumlah komponen instalasi listrik kantor	4 paket	7,000,000	10. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BKPSDM	jumlah komponen instalasi listrik kantor	4 paket	7,000,000	
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	130,000,000	11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	130,000,000	

12. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah periode bahan bacaan bagi pegawai	12 bulan	20,000,000	12. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah periode bahan bacaan bagi pegawai	12 bulan	20,000,000	
13. Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	1 kali	20,000,000	13. Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	1 kali	20,000,000	
14. Penyediaan makanan dan minuman	BKPSDM	jumlah periode makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bulan	18,000,000	14. Penyediaan makanan dan minuman	BKPSDM	jumlah periode makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bulan	18,000,000	
15. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	BKPSDM	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bulan	150,000,000	15. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	BKPSDM	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bulan	150,000,000	
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara	20	156,220,000	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara	20	156,220,000	
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKPSDM	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 bulan	49,000,000	17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKPSDM	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 bulan	49,000,000	
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah Rehap Gedung Kantor	1 paket	427,501,600	18. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah Rehap Gedung Kantor		-	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	126,400,000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	126,400,000	

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	BKPSDM	jumlah tersedianya pakaian olahraga dan baju batik	40 stel	26,400,000	1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	BKPSDM	jumlah tersedianya pakaian olahraga dan baju batik	40 stel	26,400,000	
2. Pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 orang	100,000,000	2. Pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 orang	100,000,000	
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	95%	393,000,000	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	95%	393,000,000	
Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Persentase Validasi data Kepegawaian	100%	70,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPSDM	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi ASN	100%	70,000,000	
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen naskah dan Dokumen ASN	BKPSDM	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diterbitkan	150	10,000,000	1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen naskah dan Dokumen ASN	BKPSDM	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diterbitkan	150	10,000,000	
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah laporan data kepegawaian	4	60,000,000	2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah laporan data kepegawaian	4	60,000,000	
Administrasi Kepegawaian	BKPSDM	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan	95%	109,000,000	Administrasi Kepegawaian	BKPSDM	Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian yang dilakukan	95%	109,000,000	
1. Penyusunan analisis kebutuhan formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen formasi yang disusun	1	20.000.000	1. Penyusunan analisis kebutuhan formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen formasi yang disusun	1	20,000,000	
		Jumlah dokumen tahapan pengadaan ASN	3	80.000.000			Jumlah dokumen tahapan pengadaan ASN	3	80,000,000	

2. Penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensiun	BKPSDM	Jumlah SK Pemberhentian yang diterbitkan	140	2,000,000	2. Penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensiun	BKPSDM	Jumlah SK Pemberhentian yang diterbitkan	140	2,000,000	
3. Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	BKPSDM	Jumlah SK penempatan CASN pada OPD sesuai formasi	160	2,000,000	3. Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	BKPSDM	Jumlah SK penempatan CASN/ASN pada OPD sesuai formasi	160	2,000,000	
		Jumlah ASN yang mengikuti sumpah dan janji ASN	0				Jumlah ASN yang mengikuti sumpah dan janji ASN	0		
4. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Diterbitkan	550	5,000,000	4. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Diterbitkan	550	5,000,000	
Peningkatan Kapasitas ASN		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	98%	108,000,000	Peningkatan Kapasitas ASN		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	98%	108,000,000	
1. Peningkatan Kapasitas ASN	BKPSDM	Jumlah sertifikat rapat kerja kepegawaian	50	50,000,000	1. Peningkatan Kapasitas ASN	BKPSDM	Jumlah sertifikat rapat kerja kepegawaian	50	50,000,000	
Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah laporan penilaian kinerja ASN	1	5,000,000	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah laporan penilaian kinerja ASN	1	5,000,000	
Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN Lainnya)	BKPSDM	Jumlah Laporan Kegiatan Organisasi KORPRI	0	0	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN Lainnya)	BKPSDM	Jumlah Laporan Kegiatan Organisasi KORPRI	0	0	
Fasilitasi Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Cuti, Satya Lencana dan Ujian Dinas	543	3,000,000	Fasilitasi Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Cuti, Satya Lencana dan Ujian Dinas	543	3,000,000	

Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan	1	50,000,000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan	1	50,000,000	
Pengembangan Karir ASN	BKPSDM	Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka	75%	100,000,000	Pengembangan Karir ASN	BKPSDM	Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka	75%	100,000,000	
Pengembangan Karir dan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Pengisian Jabatan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	1	100,000,000	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Pengisian Jabatan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	1	100,000,000	
Pembinaan ASN		Persentase Pembinaan ASN	90%	6,000,000	Pembinaan ASN		Persentase Pembinaan ASN	90%	6,000,000	
Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah rekomendasi izin cerai	7	3,000,000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah rekomendasi izin cerai	7	3,000,000	
Pengelolaan penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	8	3,000,000	Pengelolaan penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	8	3,000,000	
Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	6,7%	186,154,605	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	6,7%	186,154,605	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase peningkatan kompetensi manajerial ASN	6,7%	186,154,605	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase peningkatan kompetensi manajerial ASN	6,7%	186,154,605	

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	1	9,296,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	1	9,296,000	
		Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	3	176,858,605			Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	3	176,858,605	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2021 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Tebo

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada *pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah* untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional dan proporsional.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2017-2022, mencakup: Pengembangan sistem manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian, Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis kepegawaian daerah untuk mendukung Misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017-2022 yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)**. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2021 merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tebo.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur	Indek Profesionalitas ASN

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, maka program kegiatannya di dasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan

dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Tebo.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis tetapi sebagai instansi kepegawaian sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di BKPSDM.

Adapun kegiatan prioritas yang ada di BKPSDM pada tahun 2021 antara lain :

Tabel 3.1
Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo

Program	Kegiatan
1. Program Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dan Informasi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan system Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Administrasi Kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN b. Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun c. Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN d. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 3. Peningkatan Kapasitas ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas ASN b. Pengembangan Penilaian Kinerja ASN c. Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI) dan lembaga profesi ASN lainnya d. Fasilitasi Profesi ASN e. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4. Pengembangan Karir ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Karir dan Promosi ASN 5. Pembinaan ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Disiplin ASN b. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, kompetensi, Manajerial dan Fungsional a. Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan
---	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Perkiraan Maju Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tebo Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	2,614,855,690.38		100%	2,680,227,082.46
	Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan administrasi keuangan		100%	2,614,855,690.38		100%	2,680,227,082.46
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		27 orang	2,614,855,690.38		27 orang	2,680,227,082.46
5 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum		100%	1,517,901,600.00		100%	1,090,400,000.00
	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor		100%	1,391,501,600		100%	964,000,000
5 3 1 203 1	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Input Output Outcome Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000	BKPSDM	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000

5	3	1	203	2	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input													
						Output	jumlah periode pembayaran jasa Listrik	BKPSDM	12 bulan	75,000,000	BKPSDM	12 bulan	75,000,000						
						Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik												
5	3	1	203	4	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Input													
						Output	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap	BKPSDM	12 bulan	1,200,000	BKPSDM	12 bulan	1,200,000						
						Outcome	Terbayarnya asuransi Pegawai Tidak tetap												
5	3	1	203	5	4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	Input													
						Output	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	BKPSDM	4	27,000,000	BKPSDM	4	27,000,000						
						Outcome	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas												
x	xx	1	203	6	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input													
						Output	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	BKPSDM	20 unit	7,780,000	BKPSDM	20 unit	7,780,000						
						Outcome	Terbayarnya pajak kendaraan dinas												
5	3	1	203	7	6. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Input													
						Output	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	BKPSDM	12 bulan	116,800,000	BKPSDM	12 bulan	116,800,000						
						Outcome	Terlaksananya pengelolaan keuangan												

5	3	1	203	8	7. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input							
						Output	jumlah alat kebersihan kantor	BKPSDM	4 paket	39,000,000	BKPSDM	4 paket	39,000,000
						Outcome	Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor						
5	3	1	203	10	8. Penyediaan alat tulis kantor	Input							
						Output	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	BKPSDM	2 paket	70,000,000	BKPSDM	2 paket	70,000,000
						Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan baik						
5	3	1	203	11	9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input							
						Output	jumlah periode Tersedianya barang cetak dan penggandaan	BKPSDM	12 bulan	50,000,000	BKPSDM	12 bulan	50,000,000
						Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik						
5	3	1	203	12	10. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input							
						Output	jumlah komponen instalasi listrik kantor	BKPSDM	4 paket	7,000,000	BKPSDM	4 paket	7,000,000
						Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik						

5	3	1	203	13	11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Input							
						Output	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	BKPSDM	2 unit	130,000,000	BKPSDM	5 unit	130,000,000
						Outcome							
5	3	1	203	15	12. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Input							
						Output	Jumlah periode bahan bacaan bagi pegawai	BKPSDM	12 bulan	20,000,000	BKPSDM	12 bulan	20,000,000
						Outcome	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai						
5	3	1	203	16	13. Penyediaan bahan logistik kantor	Input							
						Output	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	BKPSDM	1 kali	20,000,000	BKPSDM	1 kali	20,000,000
						Outcome	Terpenuhinya informasi mengenai OPD						
5	3	1	203	17	14. Penyediaan makanan dan minuman	Input							
						Output	jumlah periode makan dan minuman kegiatan dan tamu	BKPSDM	12 bulan	18,000,000	BKPSDM	12 bulan	18,000,000
						Outcome	Terpenuhinya makan dan minum kegiatan dan tamu						

5	3	1	203	18	15. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Input												
						Output	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	BKPSDM	12 bulan	150,000,000	BKPSDM	12 bulan	150,000,000					
						Outcome	Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah											
5	3	1	203	30	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Input												
						Output	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara	BKPSDM	roda 2 16 unit, roda 4 4 unit	156,220,000	BKPSDM	roda 2 16 unit, roda 4 4 unit	156,220,000					
						Outcome	Terpeliharanya kendaraan dinas											
5	3	1	203	34	17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input												
						Output	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	BKPSDM	12 bulan	49,000,000	BKPSDM	12 bulan	49,000,000					
						Outcome	Terpeliharanya peralatan gedung kantor											
5	3	1	203	38	18. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input												
						Output	Jumlah rehap gedung kantor	BKPSDM	1 paket	427,501,600								
						Outcome	Terpeliharanya peralatan gedung kantor											
5	3	1	204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	126,400,000		100%	126,400,000					

5	3	1	204	5	1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Input Output Outcome	jumlah tersedianya pakaian olahraga dan batik Tersedianya sepatu dan pakaian olahraga serta baju batik	BKPSDM	olah raga 40 Stell batik 40 stell	26,400,000	BKPSDM	olah raga 40 Stell batik 40 stell	26,400,000
5	3	1	204	9	2. Pendidikan dan pelatihan formal	Input Output Outcome	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kinerja ASN	BKPSDM	15 orang	100,000,000	BKPSDM	15 orang	100,000,000
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian		BKPSDM	95%	393,000,000	BKPSDM	95%	875,918,221.72
5	3	2	201		Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase Validasi Data Kepegawaian		BKPSDM	100%	70,000,000	BKPSDM	100%	70,000,000
5	3	2	201	1	1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen naskah dan Dokumen ASN	Input Output Outcome	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diterbitkan Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	BKPSDM	150	10,000,000	BKPSDM	200	10,000,000
5	3	2	201	3	2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input Output Outcome	Jumlah laporan data kepegawaian Akuratnya data pegawai	BKPSDM	4	60,000,000	BKPSDM	4	60,000,000
5	3	2	202		Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan			95%	109,000,000		95%	264,918,221.72

5	3	2	202	1	1. Penyusunan analisis kebutuhan formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN	Input							
						Output	Jumlah Dokumen formasi yang disusun	BKPSDM	1	20,000,000	BKPSDM	1	20,000,000.00
						Outcome	Jumlah dokumen tahapan pengadaan ASN Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	BKPSDM	3	80,000,000	BKPSDM	3	235,918,221.72
5	3	2	202	4	2. Penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Input							
						Output	Jumlah SK Pemberhentian yang diterbitkan	BKPSDM	140	2,000,000	BKPSDM	140	2,000,000
						Outcome	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian						
5	3	2	202	8	3. Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Input							
						Output	Jumlah SK penempatan CASN pada OPD sesuai formasi	BKPSDM	160	2,000,000	BKPSDM	160	2,000,000
						Outcome	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian						
5	3	2	202	10	4. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Input							
						Output	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Diterbitkan	BKPSDM	550	5,000,000	BKPSDM	600	5,000,000
						Outcome	Meningkatnya kinerja ASN						
5	3	2	203		Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	BKPSDM	98%	108,000,000		98%	235,000,000	

5	3	2	203	1	1. Peningkatan Kapasitas ASN	Input													
						Output	Jumlah sertifikat rapat kerja kepegawaian	BKPSDM	50	50,000,000	BKPSDM	50	100,000,000						
						Outcome	Meningkatnya kapasitas ASN												
5	3	2	203	2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Input													
						Output	Jumlah laporan penilaian kinerja ASN	BKPSDM	1	5,000,000	BKPSDM	1	5,000,000						
						Outcome	Meningkatnya kinerja ASN												
5	3	2	203	4	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN Lainnya)	Input													
						Output	Jumlah Laporan Kegiatan Organisasi KORPRI	BKPSDM	0	0	BKPSDM	0	-						
						Outcome	Meningkatnya kapasitas ASN												
5	3	2	203	5	Fasilitasi Profesi ASN	Input													
						Output	Jumlah Dokumen Cuti, Satya Lencana dan Ujian Dinas	BKPSDM	543	3,000,000	BKPSDM	543	30,000,000						
						Outcome	Meningkatnya kinerja Aparatur												
5	3	2	203	7	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Input													
						Output	Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan	BKPSDM	1	50,000,000	BKPSDM	2	100,000,000						
						Outcome	Meningkatnya kinerja ASN												
5	3	2	204		Pengembangan Karir ASN		Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka		75%	100,000,000		75%	300,000,000						

5	3	2	204	1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Input												
						Output	Jumlah Pengisian Jabatan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	BKPSDM	1	100,000,000	BKPSDM	1	300,000,000					
						Outcome	Meningkatnya kinerja ASN											
5	3	2	205		Pembinaan ASN	Persentase Pembinaan ASN			90%	6,000,000		90%	6,000,000					
5	3	2	205	1	Pembinaan Disiplin ASN	Input												
						Output	Jumlah rekomendasi izin cerai	BKPSDM	7	3,000,000	BKPSDM	7	3,000,000					
						Outcome	Meningkatnya Pembinaan ASN											
5	3	2	205	2	Pengelolaan penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Input												
						Output	Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	BKPSDM	8	3,000,000	BKPSDM	8	3,000,000					
						Outcome	Meningkatnya pembinaan ASN											
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
5	4				Pendidikan dan Pelatihan													
5	4	2			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN		BKPSDM	6,7%	186,154,605		6,8%	400,000,000.00					
5	4	2	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase peningkatan kompetensi manajerial ASN		BKPSDM	6,7%	186,154,605		6,8%	400,000,000.00					

5	4	2	202	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Input							
						Output	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS		1	9,296,000		2	18,592,000.00
							Jumlah peserta diklat Pim	BKPSDM	3	176,858,605	BKPSDM	6	381,408,000.00
						Outcome	Meningkatnya Kualitas Sumber daya aparatur						

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2021 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kebutuhan OPD.

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 4 program utama. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo. Renja Tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2021. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2017-2022.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Tebo tahun 2021, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Muara Tebo, 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



HARYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199002 1 001